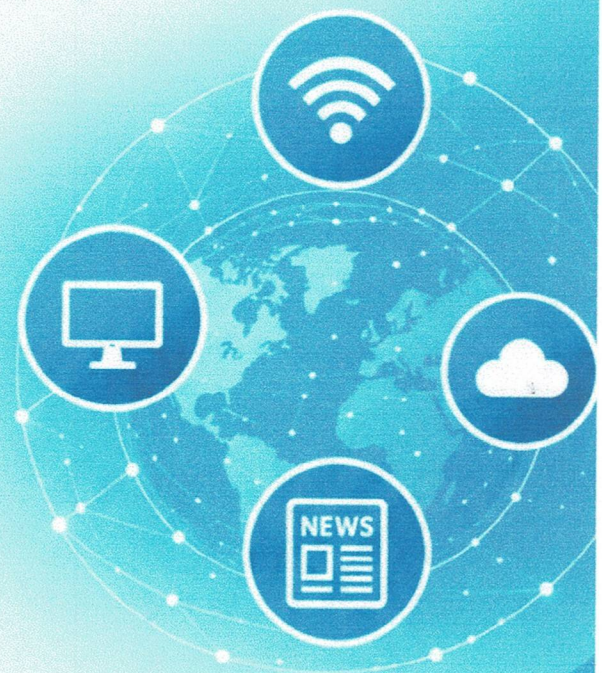
DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NATUNA

LAPORAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN 2026

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NATUNA



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita, sehingga Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2026 dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai pelaksanaan dan penjabaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2026 ini.

Dokumen Rencana Kerja ini diharapkan mampu menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan dan menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna untuk menyusun program dan kegiatan Tahun 2026.

Ranai, 1 September 2026

Kepala Dinas

IKHWAN SOLIHIN, SE.,MA

NIP. 19711208 200003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

DATAR ISI..... 2

BAB I. PENDAHULUAN..... 3

1.1 Latar Belakang..... 3

1.2 Landasan Hukum..... 8

1.3 Maksud dan Tujuan..... 10

1.4 Sistematika Penulisan..... 11

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II..... 12

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II..... 12

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 18

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 22

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 25

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 25

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH..... 27

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 27

3.2 Tujuan dan Sasaran 29

3.3 Program dan Kegiatan..... 32

3.4 Cascading dan Crosscuting..... 41

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANMGKAT DAERAH..... 44

BAB V. PENUTUP..... 49

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 138, menyebutkan bahwa perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencananaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (Satu) Tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima Tahunan kedalam perencanaan Tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna merupakan dokumen perencanaan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna untuk periode 1 (satu) Tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Natuna.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna didasarkan pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2026. Sehingga diharapkan dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna ini, didapatkan panduan dan arahan yang jelas bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, yang merupakan bahan dasar Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan Perubahan Renja OPD disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD, untuk selanjutnya dijadikan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) setelah melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16). Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna merupakan unsur Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Tugas ini mencakup perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah, penyusunan perencanaan strategis, pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran informasi kepada masyarakat serta pengelolaan penyelenggaran persandian dan Statistik.

b. Fungsi dan kewenangan

Dalam melaksanakan Tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna mempunyai Fungsi dan Kewenangannya sebagai berikut:

a. Merumuskan dan/atau menetapkan regulasi dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan inFormatika, bidang persandian dan bidang statistik;
b. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas dan program di lingkungan dinas;
c. Melaksanakan Kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik, urusan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian serta urusan lainnya di lingkungan dinas;
d. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik, administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian serta urusan lainnya di lingkungan dinas;
e. Mengevaluasi penyelenggaraan kinerja pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik, serta tugas lainnya di lingkungan dinas; dan
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (Satu) Tahun. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna merupakan penjabaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna memberikan gambaran tentang

program, kegiatan sub kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dalam satu Tahun anggaran sekaligus menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna diawali dengan persiapan penyusunan renja, dilanjutkan dengan Penyusunan Rancangan Renja, Forum SKPD, dan Penetapan Renja melalui Peraturan Bupati Kabupaten Natuna.

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Persiapan Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna mencakup :

1) Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna tentang pembentukan tim penyusun Renja;
2) Orientasi mengenai Renja;
3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja; dan
4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Aktivitas dalam penyusunan Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna meliputi :

1) Perumusan Rancangan Renja, dan
2) Penyajian Rancangan Renja.

Perumusan rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna mencakup :

a) Pengolahan data dan informasi;
b) Merevieu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu berdasarkan Renstra;

c) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
d) Telaahan terhadap rancangan awal Renja;
e) Perumusan tujuan dan sasaran;
f) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
g) Perumusan kegiatan prioritas;
h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja;
i) Penyempurnaan rancangan Renja;
j) Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan
k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

3. Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan. Dalam Forum Perangkat Daerah ini rancangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dibahas, sehingga diperoleh masukan perbaikan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

4. Penetapan Renja SKPD

Pada tahap ini, rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna yang telah disempurnakan dan sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD Kabupaten Natuna, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, dengan Renja Kementerian/Lembaga. Penyusunan Renja mengacu pada Rancangan Awal RKPD, dan memperhatikan dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

serta Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2025 - 2029. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan RKA dan DPA.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 55);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 440);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 440);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna ke dalam Rencana Tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Tujuan

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna ke dalam program dan kegiatan Tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna;
b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja Tahun 2026;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2026 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Triwulan II, berisi tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan serta Cascading dan Crooscutting

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, berisi tentang Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2026

Bab V Penutup, berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2026.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II

2.1. Hasil Evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Triwulan II Tahun 2026

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2026, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna memiliki anggaran belanja langsung sebesar **Rp10.996.038.848,00**. Dari anggaran tersebut, telah direalisasikan sebesar **Rp4.892.332.484,00** atau sebesar **44%**. Dengan demikian, masih terdapat sisa anggaran sebesar **Rp6.103.706.364,00** atau sekitar **56%** yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan berikutnya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

Realisasi anggaran sebesar 44% sampai dengan Triwulan II menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Adapun sisa anggaran yang belum terealisasi akan dioptimalkan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang telah dijadwalkan pada semester II, dengan tetap memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran dalam penggunaan anggaran.

Berikut ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan renja Tahun 2026 dan capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna.

1. Daftar program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah/Kota
   - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
   - Penyusunan Konten

c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

1) Pengelolaan e-Goverment dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   - Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE
   - Koordinasi Penyusunan Rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
   - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
   - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

e. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

2. Program/kegiatan/sub kegiatan pada Tahun 2026 telah sesuai dengan rencana target kinerja atau capaian kinerja mencapai 44%.

Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program/kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut:

a. Lebih optimal dalam memberi sosialisasi dan desiminasi tentang pentingnya peran Perangkat Daerah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik.
b. Melakukan penganggaran sesuai dengan kebutuhan dilapangan.
c. Melakukan penyesuaian target kinerja pada Renstra Tahun 2025-2029 dan penyesuaian target capaian pada tahun anggaran 2026.
d. Memastikan data yang diproduksi oleh Produsen Data berkualitas (sesuai Standar, Metadata Baku dari Pembina Data serta dihasilkan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk dan dapat dimanfaatkan bersama (interoperabilitas).
e. Sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung capaian target kinerja.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Kabupaten Natuna Tahun 2025 terlihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1

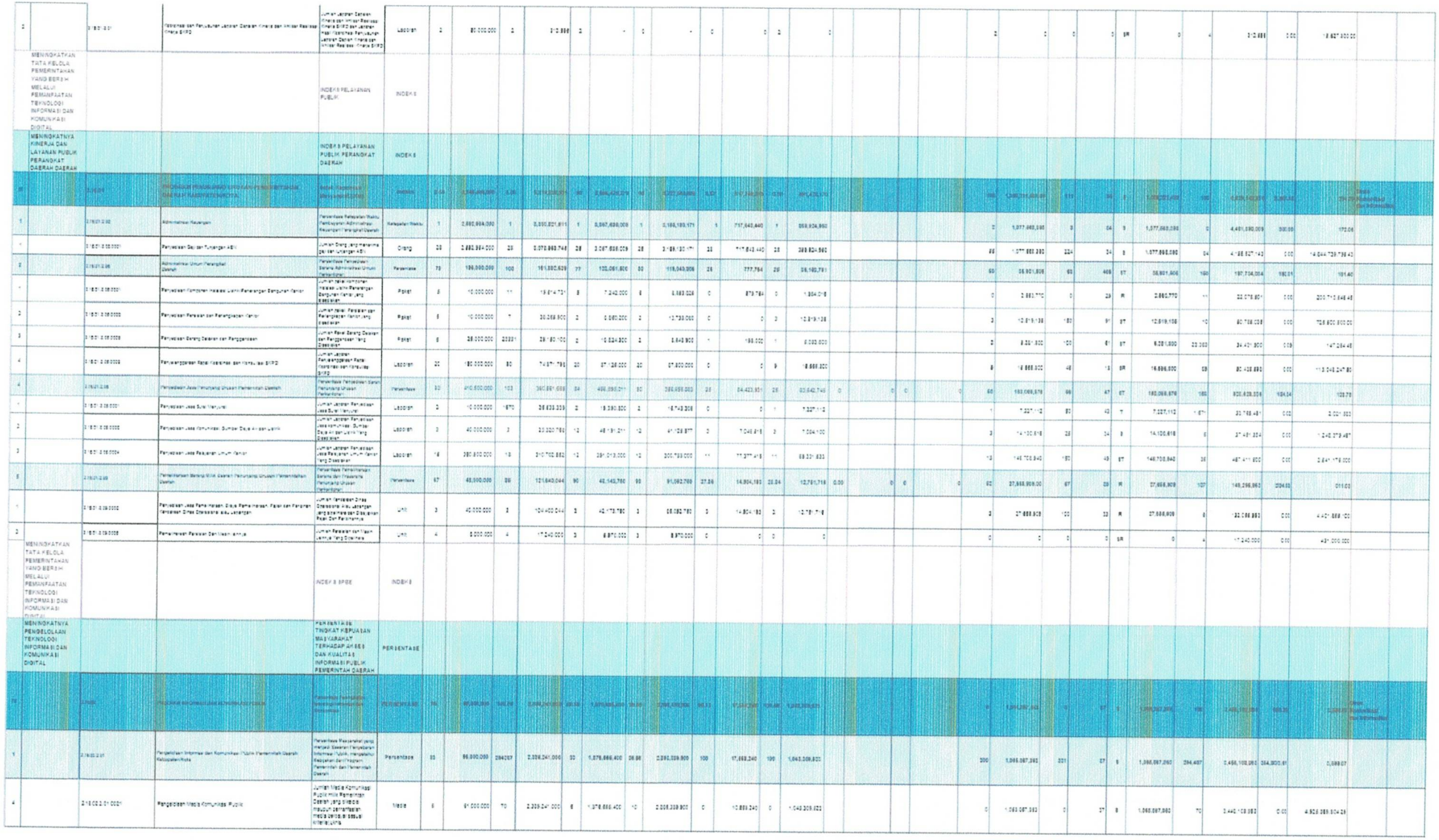
Hasil Evaluasi Renja Triwulan II

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna pada Tahun 2026

SEMESTER I TAHUN 2026

NAMA PERANGKAT DAERAH: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Tujuan/ Sasaran Renstra	Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Renstra pada Tahun 2025-2029		Realisasi capaian kinerja Renstra sampai dengan Tahun 2025 (n-1)		Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2026				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2026 yang dievaluasi (n)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2026 yang dievaluasi (%) (n)		Kategori Kinerja dan Anggaran Tahun 2026		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2026 (n)		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2026 (n)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	2.a	3	4	4.a	6		8		7				9		10		11				12		13		15.a		14		16		15	17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														
	MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIGITAL			INDEKS SPBE	INDEKS																											
	MENINGKATNYA SISTEM PENGAMANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIGITAL			TINGKAT KESIAPAN PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	INDEKS							0																					
		2.04.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE	10	100.000.000	0	0	0	0	0	0	10	0	10	12.446.304	0	-	0	-	20	12.446.304	60	12	BR	12.446.304	0	12.446.304	117,70	12,46			
1		2.04.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang telah menerapkan persandian sesuai standar teknis pengamanan informasi dan persandian	Persentase	40,00	100.000.000	21	0	0	22,53	100.223.800	22,53	100.224.162	10	0	10	12.446.304	0	-	0	-	20	12.446.304	60	12	BR	12.446.304	0	12.446.304	117,70	12,46			
2		2.04.02.2.01.0007	Pelayanan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	OPD	46	100.000.000	0	0	8	100.223.800	8	100.224.162	8	0	0	12.446.304	0	-	0	-	8	12.446.304	100	12	BR	12.446.304	0	12.446.304	10,87	12,46			
	MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIGITAL			INDEKS SPBE	INDEKS																											
	MENINGKATNYA PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIGITAL			PERSENTASE TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP AKSES DAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE							60																					
3		2.04.01	PROGRAM STATISTIK SEKTORAL	PERSENTASE TERSEDIANYA DATA SEKTORAL YANG BERKUALITAS	PERSENTASE	80	850.000.000	69	2.407.662.160	72,04	2.048.998.000	72	4.143.751.200	29	209.027.462	29	1.691.628.662	0	-	0	-	80	3.108.677.024	69	81	BT	3.108.677.024	113	4.814.329.184	150,00	782,07			
3		2.16.03.2.02.0019	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	Dokumen	-	100.000.000	3	4.498.800	3	99.999.200	3	99.999.400	0	7.979.720	0	8.348.921					0	12.828.641	0	12	BR	12.828.641	2	17.421.841	0,00	871.377.280,00			
4		2.16.03.2.02.0024	Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan jaringan intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	36	800.000.000	8	2.402.166.360	10	1.949.999.800	10	4.043.750.800	0	287.488.742	10	1.796.132.841					10	3.093.681.203	100	82	BT	3.093.681.203	20	4.496.807.842	0,00	89.936.156.840,00			
	MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIGITAL			NILAI SAKIP	NILAI																											
	MENINGKATNYA KINERJA DAN LAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH DAERAH			NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	NILAI																											
5		2.16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang Mencapai Kinerja Sesuai Target	Persentase	100	80.500.000	100	512.500	100	-	0	-	0	0	100	0	0	-	0	0	0	100	0	0,00	0	BR	0	0	212.500	200,00	0,00			
1		2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	80.500.000	100	512.500	100	-	0	-	0	0	100	0	0	-	0	0	0	100	0	0,00	0	BR	0	0	212.500	200,00	0,00			



6		2.16.03.2.01.0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	12	35.000.000	0	0	10	-	5	7.000.000	0	7.000.000	0	0					0	7.000.000	3	0	BR	7.000.000	0	7.000.000	0.00	#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIGITAL			INDEKS SPBE	INDEKS																												
	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DATA STATISTIK SEKTORAL YANG BERKUALITAS			INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK	INDEKS																												
V		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	84	102,216,200	84	102,216,000	[illegible]		[illegible]	10,706,929	[illegible]	0	[illegible]		[illegible]	10,706,929	[illegible]	10	BR	10,706,929	[illegible]	10,706,929	[illegible]	10.71	Dinas Komunikasi dan Informatika	
1		2.20.03.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data statistik sektoral yang dimiliki OPD	Persentase	100	100,000,000	0	0	84	102,216,200	84	102,216,000	84	0	0	10,706,929	0	0	0	0	84	10,706,929	1,680	10	BR	10,706,929	84	10,706,929	84.00	10.71		
1		2.20.03.2.01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	6	100.000.000	0	0	6	102.216.200	6	102.216.000	0	0	6	10.706.929					6	10.706.929	100	10	BR	10,706,929	6	10.706.929	0.00	#DIV/0!		
			Jumlah				3,692,494,000		7,709,476,887		6,770,490,870		10,987,420,991		5,140,046,020		5,085,474,605				-		4,806,319,803.00		99				10,530,722,471		0.850		
													Rata-rata capaian Kinerja Indikator Tujuan :																				
													Rata-rata capaian Kinerja Indikator Sasaran :																				
													Rata-rata capaian Kinerja Indikator Program :																				
													Rata-rata capaian Kinerja Indikator Kegiatan :																				
													Rata-rata capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan :																				

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan *bottom-up* dan *top down*, yang dikenal dengan istilah *shopping list key working plant.* Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah yang mempunyai fungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna mempunyai tujuan dan sasaran yang akan di capai, sebagai berikut :

a. Tujuan yang akan dicapai adalah "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Digital"

b. Sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi Digital
2. Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas
3. Meningkatnya Sistem Keamanan Informasi dan Komunikasi Digital
4. Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah

Untuk lebih jelasnya, pencapaian indikator-indikator sasaran tersebut diuraikan dalam tabel capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2026.

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna

Tahun 2026

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target		Realisasi		Capaian	
						2025	2026	2025	2026	2025	2026
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Digital	Indeks SPBE	Meningkatnya pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi Digital	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	0	60	65	90	88.83	150	137
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Digital	Indeks SPBE	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Statistik	0	1.87	190	1.87	0	100	0
3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Digital	Indeks SPBE	Meningkatnya Sistem Keamanan Informasi dan Komunikasi Digital	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	0	140	145	140	0	100	0
4	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Digital	Nilai SAKIP	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daera	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.55	75.60	75.65	73,25	0	0	0
5	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Digital	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daera	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3.53	3.20	3.28	3.53	0	110	0

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna secara umum **masih berjalan sesuai dengan arah dan sasaran yang telah ditetapkan**. Dari lima indikator kinerja yang menjadi tolok ukur pencapaian sasaran, indikator **Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah telah mencapai 88,83 persen atau 137 persen dari target Tahun 2026 sebesar 65 persen**. Sementara itu, indikator **Indeks Pembangunan Statistik, Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dan Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah** belum menunjukkan realisasi pada Triwulan II karena masih berada dalam tahapan pelaksanaan, pengumpulan data, evaluasi, pengukuran, atau menunggu hasil penilaian sesuai mekanisme masing-masing indikator.

Terhadap indikator yang belum mencapai target atau belum tersedia hasil pengukurannya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna akan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, memastikan ketersediaan data dan dokumen pendukung, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian seluruh target kinerja yang telah ditetapkan pada akhir Tahun Anggaran 2026.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah Tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

a. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :
   1) Belum optimalnya kualitas pengendalian dan evaluasi hasil pembangunan daerah
   2) Tingkat kemampuan SDM belum merata dalam penyusunan perencanaan pembangunan
   3) Masih kurangnya fasilitasi kebijakan dan penyelenggaraan koordinasi, kerjasama di bidang perekonomian dan sosial budaya, di bidang sarana prasarana dan lingkungan hidup, dan di bidang pemerintahan
   4) Masih lemahnya integrasi data antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dengan perangkat daerah
   5) Masih lemahnya integrasi sistem data perencanaan dan evaluasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dengan perangkat daerah

6) Belum terpenuhinya kebutuhan hasil penelitian dan pengembangan untuk menunjang kinerja pembangunan daerah.

b. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

1) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna memilki tantangan untuk mendorong seluruh perangkat daerah dalam memecahkan isu strategis di Kabupaten Natuna, meliputi :
   a. Kualitas Pembangunan Manusia belum optimal
   b. Kesetaraan dan Keadilan Gender masih rendah
   c. Pemerataan dan Mutu Pendidikan masih rendah
   d. Derajat Kesehatan Masyarakat belum optimal
   e. Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur belum memadai
   f. Pengembangan Wilayah Perbatasan Belum Optimal
   g. Pengembangan Kemaritiman dan pariwisata belum optimal
   h. Konektivitas Antar Pulau atau Kecamatan
   i. Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan yang Tinggi
   j. Peningkatan pendapatan masyarakat
   k. Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
   l. Menciptakan lapangan kerja baru atau tenaga kerja terampil
2) Tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan transparansi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan semakin meningkat, menjadi tantangan untuk terus memperbaiki proses dan meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta mendorong perangkat daerah untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.
3) Perkembangan peraturan dan kebijakan pembangunan nasional yang berubah-ubah menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga tercipta

sinergitas pembangunan.

4) Perubahan dinamika di tingkat nasional dan dunia yang terus berubah menuntut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna untuk menyusun dokumen perencanaan Kabupaten Natuna yang komprehensif dan mampu mengantisipasi perkembangan dinamika di tingkat nasional dan global.

c. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1) Banyaknya dukungan dari berbagai pihak untuk menyusun dokumen perencanaan yang baik.
2) Tersedianya sarana sistem informasi yang berbasis elektronik dalam perencanaan.
3) Banyaknya bimbingan teknis dan pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas aparatur perencana.
4) Banyaknya lembaga penelitian atau penyedia jasa yang dapat membimbing dan mengarahkan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara baik, sehingga dihasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan selaras dengan dokumen perencanaan di tingkat daerah maupun nasional.

Beberapa isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna sebagai berikut :

a) Belum optimalnya koordinasi dan sinergi program antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dengan perangkat daerah dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan daerah.
b) Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan di seluruh bidang untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026, secara umum telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat dari rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan awal RKPD sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan Tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pada Tahun 2026 terdapat usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan khususnya di bidang Komunikasi dan Informatika.

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026 dari Pemangku Kepentingan

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian	Satuan	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik/Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota /dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	- Pengadaan Videotron Outdoor untuk Lahan Pemerintah (Simpang Puskesmas, Simpang Bukit Arai, Simpang Masjid Agung)	3 Paket	3.600.000.000,00	APBN
		- Videotron Indoor untuk Gedung Pemerintah Daerah (Gedung Serindit, Gedung Wanita)	2 Paket	2.880.000.000,00	APBN
		- Pengadaan Papan Billborad untuk Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Bunguran selatan, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Bunguran Tengah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Serasan, Kecamatan Midai dan Kecamatan Subi	11 Unit	1.320.000.000,00	APBN
2.	Pengelolaan Aplikasi Informatika/Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota /dan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	- Penguatan Jaringan Sinyal 4G Indosat (Penambahan Bandwith) di Kecamatan Pulau Laut Desa Tanjung Pala	1 Paket	100.000.000,00	APBN
		- Pembangunan Tower Baru (Telkomsel) di Kecamatan Serasan (Desa Tanjung Balau, Desa Air Nusa), Kecamatan Bunguran Selatan (Desa Cemaga Utara, Desa Cemaga Tengah), Desa Tanjung Pala Kec. Pulau Laut, Desa Pulau Kerdau Kec. Pulau Panjang, Desa Selaut Kec. Bunguran Barat, Desa Semedang Kec. Bunguran Batubi, Desa Air Putih Kec. Midai dan Desa Seluan Barat Kec. Pulau Seluan	10 Paket	100.000.000,00	APBN
		- Pengadaan Jaringan Starlink dan Paket di Pulau Sekatung dan Kantor Desa Tanjung Pala Kecamatan Pulau Laut	4 Paket	80.000.000,00	APBN
Jumlah				*17.980.000.000,00*	

BAB III
TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Sebagai strategi dalam pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Pada Tahun 2026 pemerintah mempunyai lima agenda pembangunan sebagaimana berikut ini:

1. Meneguhkan Kedaulatan Pangan, Energi dan Air.
2. Mendorong Produktivitas Ekonomi melalui Hilirisasi.
3. Transpormasi Digital.
4. Penguatan Daya Asing.
5. Menjamin Inklusivitas Pembangunan agar tidak ada warga yang tertinggal.

Isu Strategis nasional yang akan ditangani pada Tahun 2026 adalah:

1. Ketahanan Pangan
2. Ketahanan Energi
3. Program Kesejahteraan Rakyat
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
5. Pemberantasan Kemiskinan
6. Akselerasi Investasi dan Perdagangan
7. Pembangunan Inklusif
8. Reformasi Birokrasi dan Pertahanan

Rencana Kerja Pemerintah 2026 memiliki tema pembangunan **Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**. Tema pembangunan tersebut mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional. Empat Prioritas Nasional Tahun 2026 yang merupakan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029, meliputi:

1. Meneguhkan kemandirian di Sektor Pangan, Energi, dan Air serta memperkuat Sistem Pertahanan dan Kemanan
2. Mendorong Hilirisasi Sumber Daya Alam, Transpormasi Digital, Penguatan Daya Saing dan Pengembangan Ekonomi Hijau serta biru Menjamin Pemerataan
3. Mengentaskan Kemiskinan, Meningkatkan Kualitas SDM, serta membangun dari Desa dan Bawah untuk Pemerataan
4. Memperkuat Layanan Publik Terintegrasi (omnichannel) dan tata Kelola Pemerintahan Digital yang transparan dan akuntabel.

Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 diarahkan pada optimalisasi potensi perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur wilayah dan pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya. Dalam melaksanakan fokus pembangunan dan target pembangunan Tahun 2026 sebagaimana diuraikan di atas, ditetapkan **prioritas pembangunan** Provinsi Kepulauan Riau untuk RKPD Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi Maritim dan Investasi Berkualitas.
2. Peningkatan Konektivitas antar Wilayah dan pemerataan Pembangunan Insfrastruktur.
3. Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan prioritas pembangunan provinsi Tahun 2026 sehingga penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan Tahunan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026

dengan tema **"Percepatan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan Antar Pulau"**

Berdasarkan tema diatas, ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 yaitu:

1. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
2. Pemerataan Pembangunan Antar Pulau
3. Peningkatan Konektivitas

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna mendorong pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang mengarah pada pencapaian prioritas pembangunan.

3.2 Tujuan dan Sasaran

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun. Tujuan akan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan dengan lebih mengoperasionalkan pelaksanaan misi. Tujuan juga mencerminkan adanya prioritas program dan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui perumusan tujuan diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran Tahunan, arah kebijaksanaan, pogram

serta kegiatan.

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Kabupaten Natuna konsisten dengan tugas pokok dan fungsinya secara kolektif menggambarkan arah strategisnya dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai. Adapun Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna adalah **"Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Digital"** dengan indikator tujuan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten NatunaTahun 2026

MISI 4 : "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi".			
Tujuan	**Indikator Tujuan**	**Rumus Perhitungan**	**Target**
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Digital	Indeks SPBE	Hasil Evaluasi SPBE	3,63
	Indeks Pelayanan Publik	Hasil Evaluasi	3,28
	Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah	75,65

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun. Dengan demikian Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan

strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) Tahun atau kurang dari 1 Tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 Tahun ke depan. Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran.

Penetapan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna untuk periode Renstra 2025-2029, beserta indikator capaiannya diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai. Sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna

Tahun 2026

Sasaran	Indikator	Rumus Perhitungan	Target
Meningkatnya Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Digital	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Survey Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	65
Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Statistik	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	1,90
Meningkatnya Sistem Keamanan Informasi dan Komunikasi Digital	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks KAMI	145
Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	1. Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah	75,65
Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	2. Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	2. Dari Hasil Perhitungan Bagian Organisasi	3,28

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna pada Tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

a. Merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan

kebijakan yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029,

b. Mengarahkan pada penanganan permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Kabupaten Natuna sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2025-2029.

3.3.2 Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program merupakan sekumpulan kegiatan yang disusun secara sistematis, terpadu, dan saling mendukung untuk menghasilkan keluaran dan manfaat yang sesuai dengan sasaran serta tujuan organisasi. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap program berfungsi sebagai instrumen strategis yang mengarahkan pelaksanaan kegiatan agar lebih terukur, terencana, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Program kemudian dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan yang lebih operasional sebagai bagian dari upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan, sehingga setiap kegiatan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan secara keseluruhan.

Pada Tahun Anggaran 2026, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna melaksanakan 5 (lima) program yang didukung oleh 8 (delapan) kegiatan dan 16 (enam belas) subkegiatan. Seluruh pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan tersebut direncanakan dan dibiayai sepenuhnya melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026.

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Kabupaten Natuna

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			**10.996.038.848,00**			**6.196.00.000,00**
	2					**UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**10.996.038.848,00**			**6.196.00.000,00**
	2	**16**				**UNSUR PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**10.793.599.696,00**			**5.996.000.000,00**
1	**2**	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP**	**90 PERSEN**	**3.756.458.596,00**		-	**3.571.000.000,00**
	2	16	01	2.01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan waktu pembayaran administrasi keuangan perangkat daerah	1 Tepat Waktu	3.187.698.158,00		-	2.697.600.000,00
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.187.698.158,00	DANA TRANFER UMUM-DANA (DAU)		2.697.600.000,00
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah terselesaikan	7 Paket	119.040.805,00		-	234.500.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Paket	8.853.825,00	DANA TRANFER UMUM-DANA (DAU)		15.000.000,00
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	13.738.080,00	DANA TRANFER UMUM-DANA (DAU)		26.000.000,00
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.648.900,00	DANA TRANFER UMUM-DANA (DAU)		8.500.000,00
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	87.800.000,00	DANA TRANFER UMUM-DANA (DAU)		87.800.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	85 Persen	358.656.883,00		-	609.900.000,00
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	16.743.306,00	DANA TRANFER UMUM-DANA (DAU)		7.000.000,00
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	41.125.577,00	DANA TRANFER UMUM-DANA (DAU)		35.000.000,00
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	391.013.000,00	DANA TRANFER UMUM-DANA (DAU)		567.900.000,00
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	90 Persen	91.062.750,00		-	29.000.000,00
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						

o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	85.092.750,00	DANA TRANFER UMUM-DANA (DAU)		23.000.000,00
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	5.970.000,00	DANA TRANFER UMUM-DANA (DAU)		6.000.000,00
	2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENJADI SASARAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK, MENGETAHUI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**86,56 PERSEN**	**2.893.389.900,00**		-	**200.000.000,00**
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	49481 Orang	2.893.389.900,00		-	200.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik						
							Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	10 Media	2.886.389.900,00	DANA TRANFER UMUM-DANA (DAU)		100.000.000,00
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten						
							Jumlah Konten Informasi Publik	10 Konten	7.000.000,00	DANA TRANFER UMUM-DANA (DAU)		100.000.000,00
	2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGELOLA APLIKASI INFORMASI**	**56 PERSEN**	**4.143.751.200,00**		-	**2.225.000.000,00**
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-goverment dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan SPBE yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi	72 Persen	4.143.751.200,00		-	2.225.000.000,00
	2	16	03	2.02	0019	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9
							Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan manejemen SPBE	2 Dokumen	99.99 3.400,00	DANA TRANFER UMUM-DANA (DAU)		100.000 000,00
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota						
							Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	10 Perangkat Daerah	4.043 752.800,00	DANA TRANFER UMUM-DANA (DAU)		2.125.00 0.000,00
	2	20	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**PERSENTASE OPD YANG MENYEDIAKAN DATA DAN METADATA STATISTIK SEKTORAL**	**84 PERSEN**	**102.215.000,00**		-	**100.000 .000,00**
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Statistik Sektoral yang dimiliki OPD	315 Data	102.2 15.000,00		-	100.000 000,00
	2	20	02	2.01	0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral						
							Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	5 Orang	102.2 15.000,00	DANA TRANFER UMUM-DANA (DAU)		100.000 000,00

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2				3	4	5	6	7	8	
	2 21	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**PERSENTASE PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH**	**75 PERSEN**	**100.224.152,00**		-	**100.000.000,00**
	2 21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah menerapkan prosedur pengaman informasi dan persandian	46 OPD	100.224.152,00		-	100.000.000,00
	2 21	02	2.01	0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah						
						Jumlah Perangkat Daerah yang Telahela Menggunakan Layanan Kee Keamanan Informasi dAn Persandian	5 Perangkat Daerah	100.224.152,00	DANA TRANFER UMUM-DANA (DAU)		100.000.000,00
JUMLAH								**10.996.038.848,00**			**6.196.000.000,00**

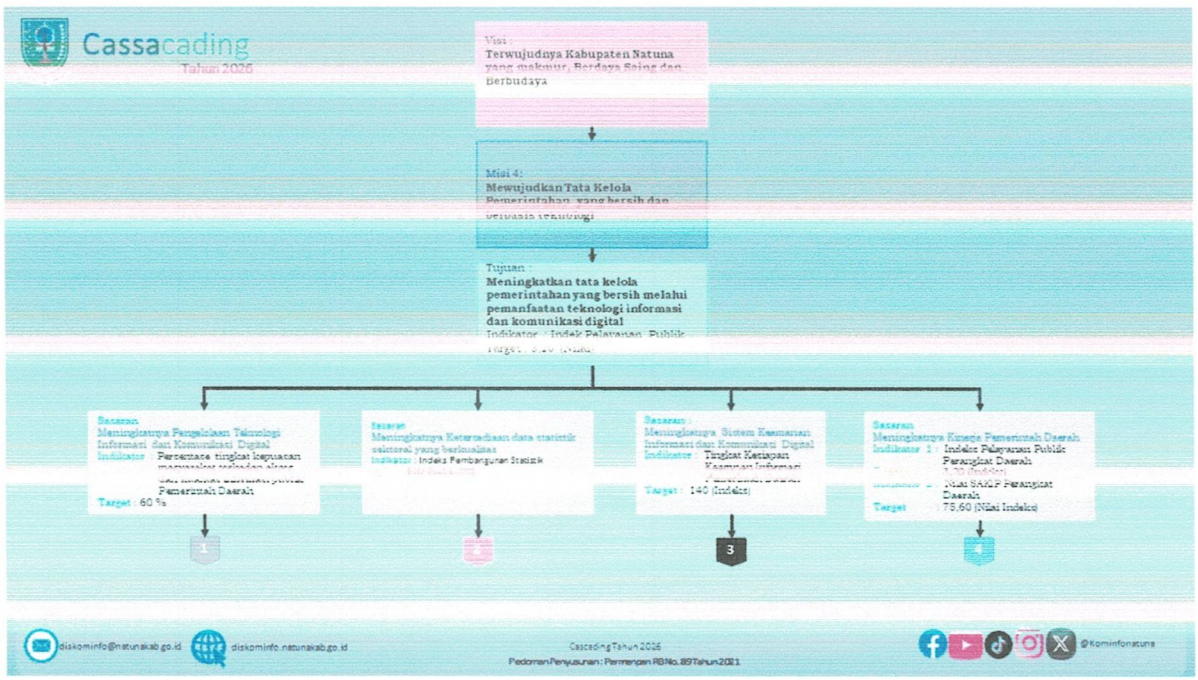
3.4 Cascading dan Crosscutting

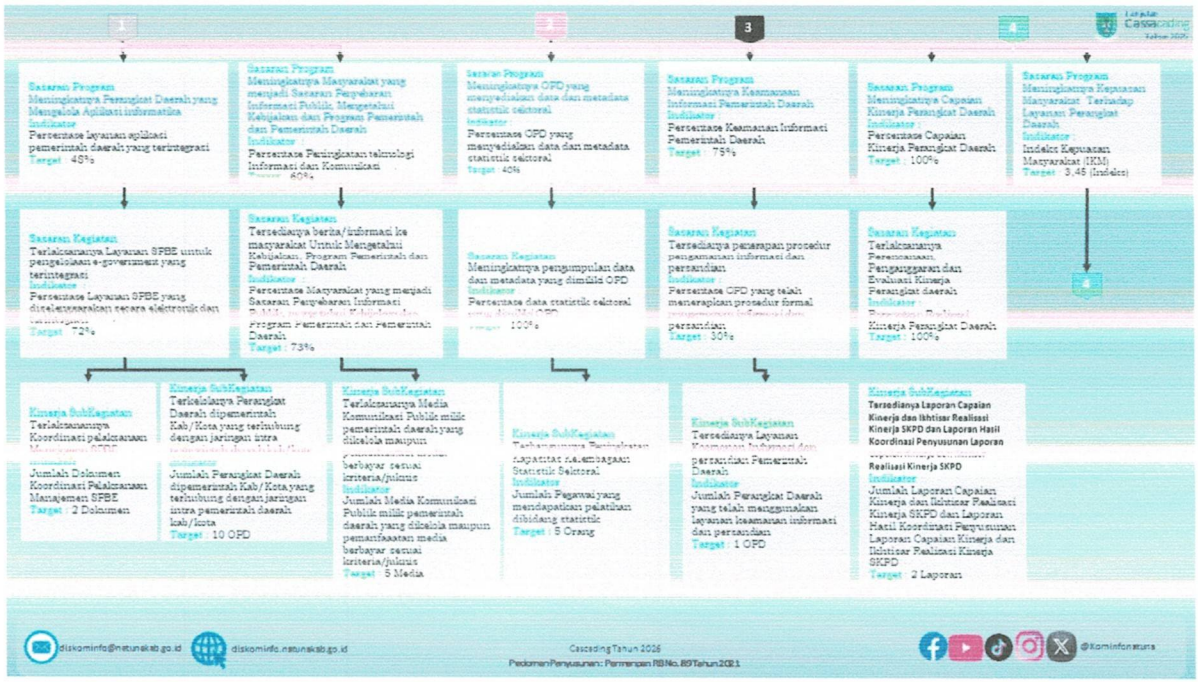
Salah satu sub komponen dalam perencanaan adalah mengukur sejauh mana Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).

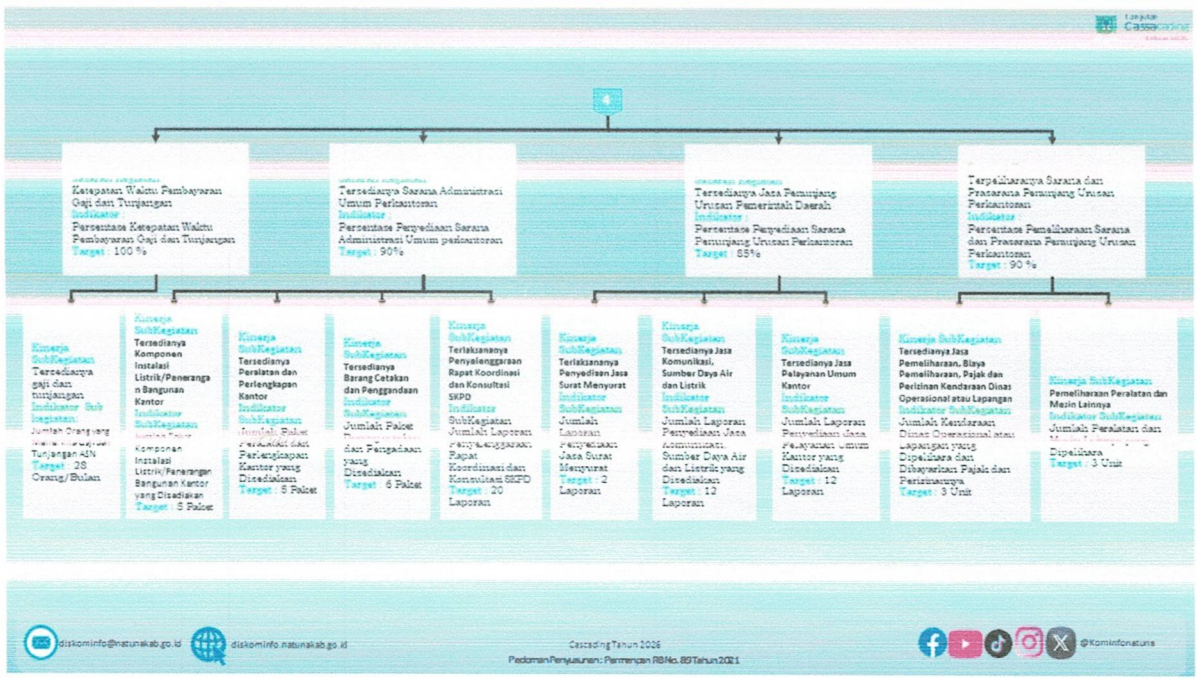
3.4.1 Cascading

Cascading Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada:

Gambar 3.1 Cascading Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2026.





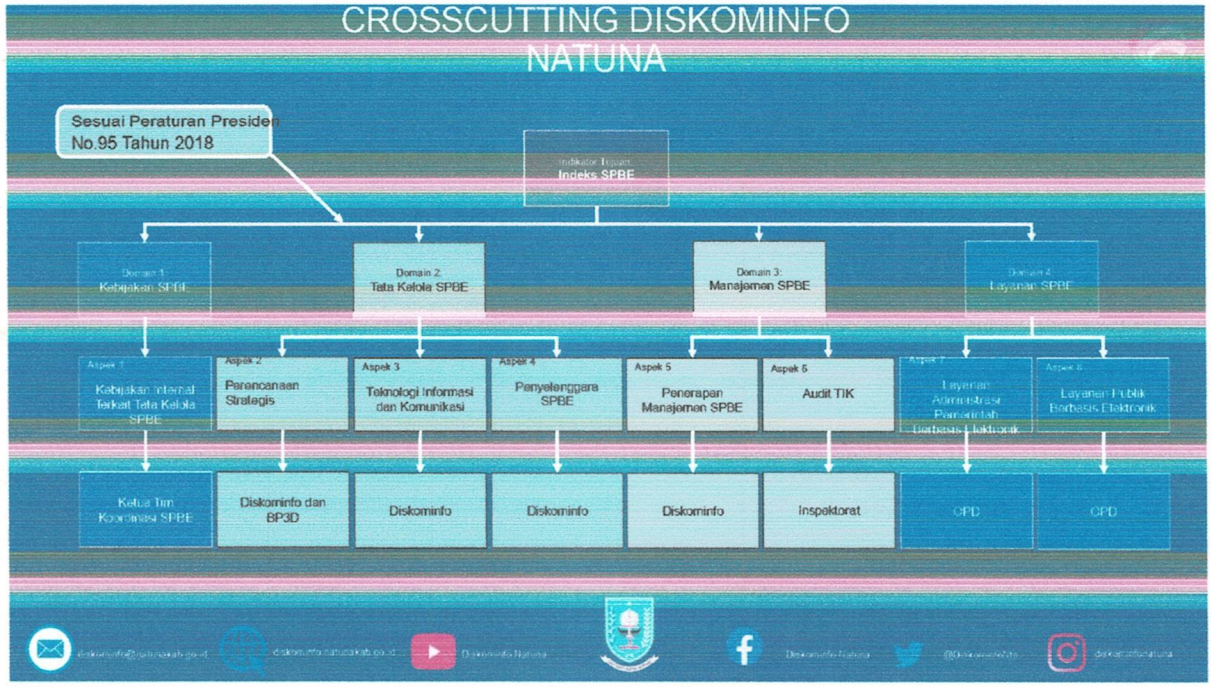


3.4.2 Crosscutting

Crosscutting Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2026 menggambarkan pencapaian target kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor yang beririsan secara horizontal tidak selalu secara vertical (secara hirarki structural) sehingga dapat mengidentifikasi isu kinerja secara lebih menyeluruh. Bagan Cross Cutting dapat dilihat pada:

Gambar 3.2 Crosscutting

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2026



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna pada Tahun 2026 yaitu sebagai berikut :

a. Mengarah pada perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.
b. Mengarahkan pada penanganan permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2025-2029.

Secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan serta Pagu Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2026 tertuang dalam Tabel 4.1 Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2026.

Tabel 4.1

RENCANA KINERJA TAHUNAN
PERANGKAT DAERAH

SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN : 2026

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
4.1.1.1.1	Meningkatnya Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Digital	Persentase Tingkat Kepuasan masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	Persen	65
4.1.1.1.2	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	1,90
4.1.1.1.3	Meningkatnya Sistem Keamanan Informasi dan Komunikasi Digital	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Indeks	145
4.1.1.1.4	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	3.28
4.1.1.1.4	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daeran	Nilai	75,65

Ranai, 24 September 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

IKHWAN SOLIHIN, SE., MA
NIP. 19711208 200003 1 005

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. NATUNA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							7.823.879.970,00	8.896.370.861,00	10.996.038.848,00	3.172.458.878,00							5.199.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.823.879.970,00	8.896.370.861,00	10.996.038.848,00	3.172.458.878,00							5.199.000.000,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							7.821.140.970,00	8.693.931.709,00	10.793.699.696,00	3.172.458.726,00							5.998.000.000,00	
1	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP				90 Persen	90 Persen	3.804.478.670,00	3.727.940.609,00	3.766.468.896,00	-123.476.870,00							3.871.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	-	3.804.478.670,00	3.727.940.609,00	3.766.468.896,00	-	-	-	-	-	-	-	3.871.000.000,00	-
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan waktu pembayaran administrasi keuangan perangkat daerah				1 Tepat Waktu	1 Tepat Waktu	3.067.686.006,00	3.159.180.171,00	3.167.698.158,00	120.012.149,00			-	-	-	-	2.597.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	26 Orang/bulan	3.067.686.006,00	3.159.180.171,00	3.167.698.158,00	120.012.149,00	Kab. Natuna Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.597.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah terselesaikan				7 Paket	7 Paket	122.051.800,00	119.040.805,00	119.040.805,00	-3.010.995,00			-	-	-	-	234.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	3 Paket	7.242.000,00	8.853.825,00	8.853.825,00	1.611.825,00	Kab. Natuna Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8.860.600,00	13.738.080,00	13.738.080,00	4.877.480,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			26.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	19.524.300,00	8.048.900,00	8.048.900,00	-11.175.400,00	Kab. Natuna Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	15 Laporan	67.125.000,00	67.800.000,00	67.800.000,00	675.000,00	Kab. Natuna Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran				85 Persen	85 Persen	459.599.011,00	356.656.883,00	356.655.883,00	-97.938.128,00			-	-	-	-	609.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	19.290.800,00	16.743.306,00	16.743.306,00	-2.547.494,00	Kab. Natuna Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	46.191.211,00	41.125.577,00	41.125.577,00	-5.065.634,00	Kab. Natuna Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	11 Laporan	391.013.000,00	300.788.000,00	300.788.000,00	-90.225.000,00	Kab. Natuna Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			567.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase perangkat barang milik perangkat daerah				90 Persen	90 Persen	48.143.750,00	91.062.750,00	91.062.750,00	42.919.000,00			-	-	-	-	29.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	42.173.750,00	85.092.750,00	85.092.750,00	42.919.000,00	Kab. Natuna Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			23.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	6.973.000,00	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00	Kab. Natuna Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah				66,66 Persen	66,66 Persen	1.976.665.400,00	1.954.239.900,00	2.893.369.900,00	-1.976.665.400,00							200.000.000,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah				49451 Orang	49451 Orang	1.976.665.400,00	1.954.239.900,00	2.893.369.900,00	1.016.724.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penyelarasan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.02.2.01.9021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun dimanfaatkan media berbayar sesuai infrastruktur				10 Media	10 Media	1.876.065.400,00	1.954.239.900,00	2.986.389.900,00	1.009.724.500,00	Kab. Natuna Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.9023	Penyusunan Konten																		
			Jumlah Konten Informasi Publik				10 Konten	10 Konten	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Natuna Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**2.049.999.000,00**	**3.011.751.200,00**	**4.143.751.200,00**	**175.001.000,00**							**2.225.000.000,00**	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase layanan SPBE yang dilaksanakan secara elektronik dan terintegrasi*				72 Persen	72 Persen	2.049.999.000,00	3.011.751.200,00	4.143.751.200,00	2.093.752.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		2.225.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				2 Dokumen	1 Dokumen	99.999.200,00	99.998.400,00	99.998.400,00	-800,00	Kab. Natuna Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				10 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	1.949.999.800,00	2.911.752.800,00	4.043.752.800,00	2.093.753.000,00	Kab. Natuna Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	-			2.125.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**102.215.200,00**	**102.215.000,00**	**102.215.000,00**	**-200,00**							**100.000.000,00**	
1	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase OPD yang menyediakan data dan metadata statistik sektoral**				**64 Persen**	**64 Persen**	**102.215.200,00**	**102.215.000,00**	**102.215.000,00**	**-2.215.200,00**							**100.000.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah data statistik sektoral yang dimiliki OPD*				315 Data	315 Data	102.215.200,00	102.215.000,00	102.215.000,00	-200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan	- -	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.9020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah pegawai yang meningkatkan pelatihan di bidang statistik				5 Orang	5 Orang	102.215.200,00	102.215.000,00	102.215.000,00	-200,00	Kab. Natuna Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan	- -			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**100.223.800,00**	**100.224.152,00**	**100.224.152,00**	**352,00**							**100.000.000,00**	
1	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**100.223.800,00**	**100.224.152,00**	**100.224.152,00**	**-223.800,00**							**100.000.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah OPD yang telah menerapkan prosedur pengamah informasi dan persandian*				46 OPD	46 OPD	100.223.800,00	100.224.152,00	100.224.152,00	352,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	- -	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/Berkurang (10-12)			NASIONAL	DAERAH				
	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah																		
			Jumlah rekapitulasi Laporan yang Telah Ditindaklanjuti Layanan Pengaduan Informasi dan Persandian				3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	100.224.970,00	100.224.192,00	100.224.192,00	-778,00	Kab. Natuna, Bandar Seri Perkasa, Semua Kel/Desa	Lokasi Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pertahanan, keamanan, hukum dan ketertiban serta memperkuat pelayanan dan pembinaan masyarakat, pelindungan, dll. dan penyelesaian	- -			100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	JUMLAH								7.923.079.970,00	8.096.370.961,00	10.999.038.948,00	3.173.486.979,00							5.199.000.000,00	

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna

IKHWAN SOLIHIN, SE., MA
NIP. 19711208 200003 1 005

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, serta menghasilkan penelitian dan pengembangan yang bermanfaat guna mendukung pencapaian visi Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pejabat struktural di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna agar mengawal pelaksanaan Renja Tahun 2026 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program kerja Tahun 2026 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan program, kegiatan sub kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna melaksanakan program, kegiatan sub kegiatan Renja Tahun 2026 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

2. Kepala Dinas dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026 guna memastikan pelaksanaan program, kegiatan sub kegiatan berjalan dengan baik.

Seiring dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2026, penetapan prioritas pembangunan pada Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian, serta Bidang Statistik diharapkan dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis, dan berkelanjutan dengan perangkat daerah lainnya. Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 ini, diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas kinerja serta memperkuat peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna sebagai perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik. Selain itu, Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 ini diharapkan dapat mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029.

Ranai, 1 September 2025

Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

IKHWAN SOLIHIN, SE.MA

NIP. 19711208 200003 1 005


NEWS